

REFORMASI BIROKRASI BADAN POM 2020 sd 2024

**Inspektur Utama
apt. Dra. Elin Herlina, MP**

08 Juli 2020



OUTLINE

HAKEKAT REFORMASI BIROKRASI

REFORMASI BIROKRASI BPOM

ZONA INTEGRITAS

Hakekat

Reformasi Birokrasi



PRIORITAS KERJA

5 TAHUN KE DEPAN 2019-2024

1

PEMBANGUNAN SDM

- SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai IPTEK
- Mengundang talenta global

2

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

- Penghubung produksi dan distribusi
- Mempermudah akses wisata
- Mendongkrak lapangan kerja
- Nilai tambah perekonomian

3

SIMPLIFIKASI REGULASI

- Kendala regulasi disederhanakan, dipotong, dan dipangkas
- Omnibus Law

4

PENYEDERHANAAN BIROKRASI

- Penyederhanaan birokrasi menjadi 2 (dua) level eselon
- Peralihan jabatan struktural menjadi fungsional

5

TRANSFORMASI EKONOMI

Daya saing manufaktur dan jasa modern bernilai tambah tinggi



MAKNA REFORMASI BIROKRASI

BADAN POM RI

JIKA BERHASIL

- mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik;
- meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
- meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi;
- meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu);
- menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif.

JIKA GAGAL

Reformasi birokrasi hanya akan menimbulkan ketidakmampuan birokrasi dalam menghadapi kompleksitas yang bergerak secara eksponensial di abad ke-21, antipati, trauma, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan ancaman kegagalan pencapaian pemerintahan yang baik (*good governance*), bahkan menghambat keberhasilan pembangunan nasional.

REFORMASI
BIROKRASI HARUS
DIRENCANAKAN
DENGAN BAIK

GRAND DESIGN
REFORMASI
BIROKRASI
2010-2025

ROAD MAP
REFORMASI
BIROKRASI
5 TAHUNAN

KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

TRANSFORMASI **REFORMASI** BIROKRASI SAMPAI 2025

Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010 - 2025

Perpres No. 81 Th. 2010

RULE BASED BUREAUCRACY

PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY

DYNAMIC GOVERNANCE

VISI
Menjadi Pemerintahan Kelas Dunia

2014
Roadmap 2010-2014

2019
Roadmap 2015-2019

2025
Roadmap 2020-2025

- Efektif, efisien dan ekonomis
- Difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil)
- Menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik
- Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi

Pada tahun 2025, Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:

- a. tidak ada korupsi;
- b. tidak ada pelanggaran;
- c. APBN dan APBD baik;
- d. semua program selesai dengan baik;
- e. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
- f. komunikasi dengan publik baik;
- g. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
- h. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
- i. hasil pembangunan nyata (pertumbuhan, prolapsangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)

TRANSFORMASI KELEMBAGAAN NASIONAL

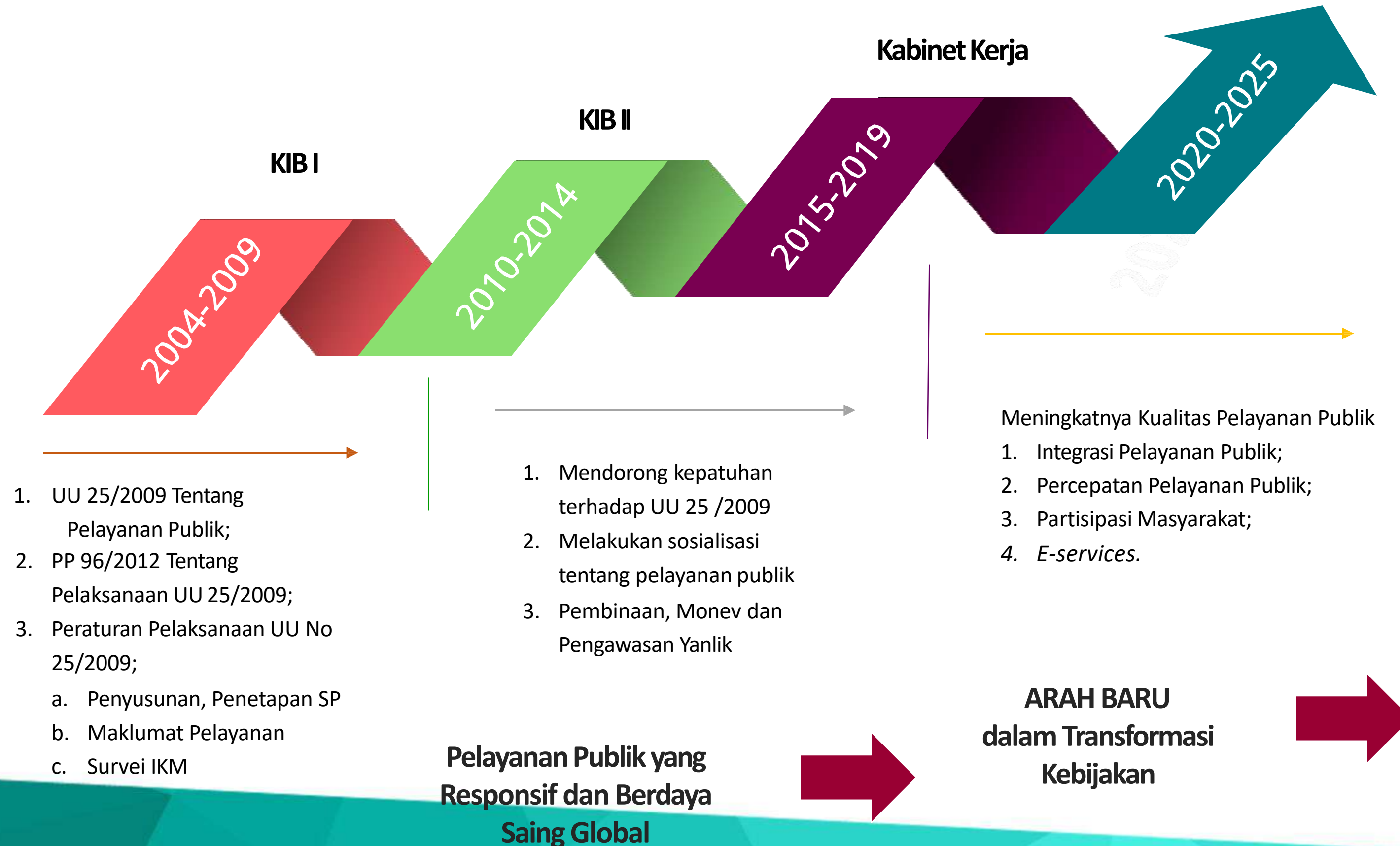
Praktek Pemerintahan Dinamis 2025

Pengembangan *Grand Design* Tata Kelola Pemerintahan mendukung pencapaian Visi Indonesia 2045



ROAD MAP BIDANG PELAYANAN PUBLIK NASIONAL

**PELAYANAN
PUBLIK
BERKUALITAS
DUNIA**



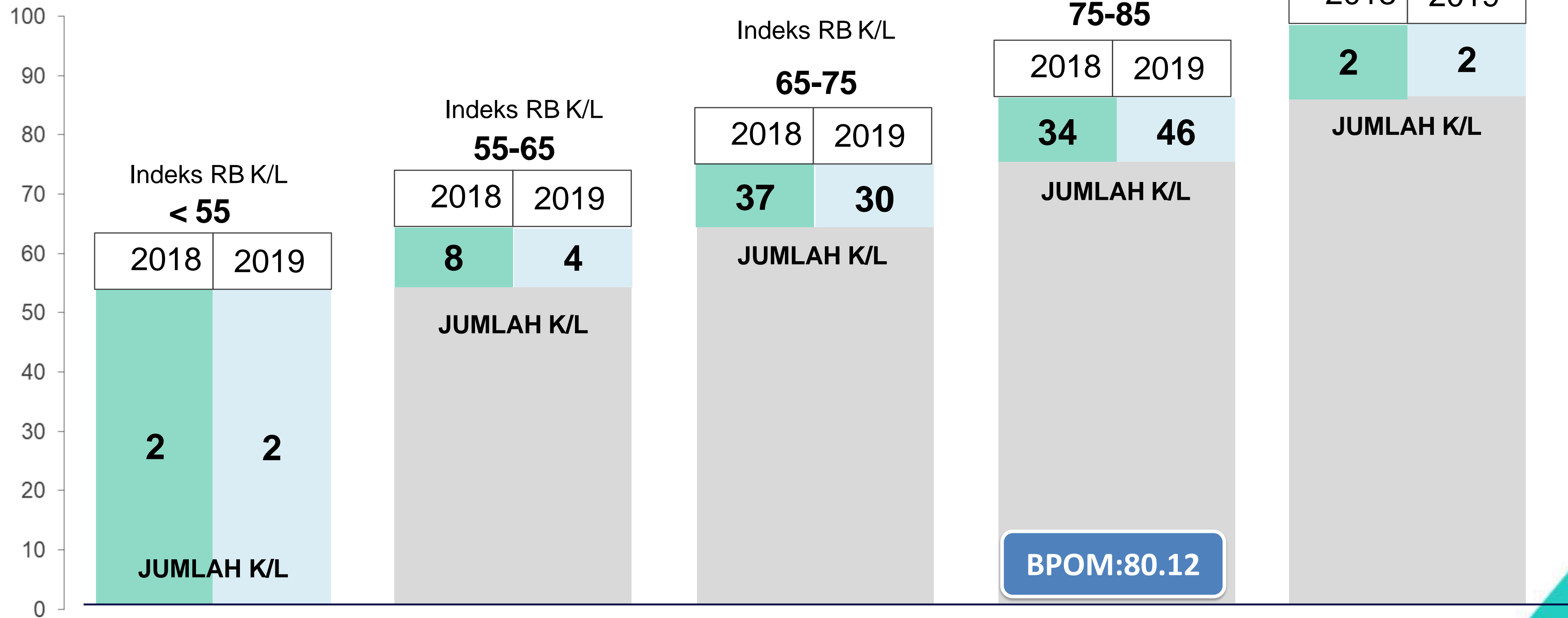
Reformasi Birokrasi

BADAN POM

BADAN POM RI



PERKEMBANGAN INDEKS REFORMASI BIROKRASI K/L



DARI DATA INDEKS RB DIATAS DAPAT DIKATAKAN BAHWA IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI **MENGALAMI PERBAIKAN DAN PENINGKATAN KEARAH YANG LEBIH BAIK TETAPI BERJALAN DENGAN SANGAT LAMBAT.**



Effective

MENDORONG PELAKSANAAN

- 1. EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
- 2. EVALUASI ZONA INTEGRITAS
- 3. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA



3 SASARAN REFORMASI BIROKRASI



Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi



Pemerintah yang efektif dan efisien



Pelayanan publik yang baik dan berkualitas



Pemerintahan Belum Bersih, Kurang Akuntabel dan Berkinerja Rendah



Pemerintahan Belum Efektif dan Efisien



Pelayanan Publik Masih Buruk



EFFICIENCY



PUBLIC SERVICE ACCOUNTABILITY



TRANSPARENCY



SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

1

Birokrasi yang bersih dan akuntabel



- ❖ Deregulasi
- ❖ Akuntabilitas
- ❖ Pengawasan

2

Birokrasi yang kapabel



- ❖ Manajemen Perubahan
- ❖ Deregulasi
- ❖ Organisasi
- ❖ Tatalaksana
- ❖ SDM Aparatur

3

Pelayanan Publik yang Prima



- ❖ Pelayanan Publik

Menguatnya Integritas dan Budaya Anti Korupsi di BPOM

Penyederhaan birokrasi di BPOM

Pengawasan internal yang independen, professional, dan sinergis di BPOM

Penyederhanaan proses bisnis, mudah, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di BPOM

Menguatnya manajemen kinerja yang efektif, efisien, dan akuntabel di BPOM

Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi ASN berbasis sistem merit

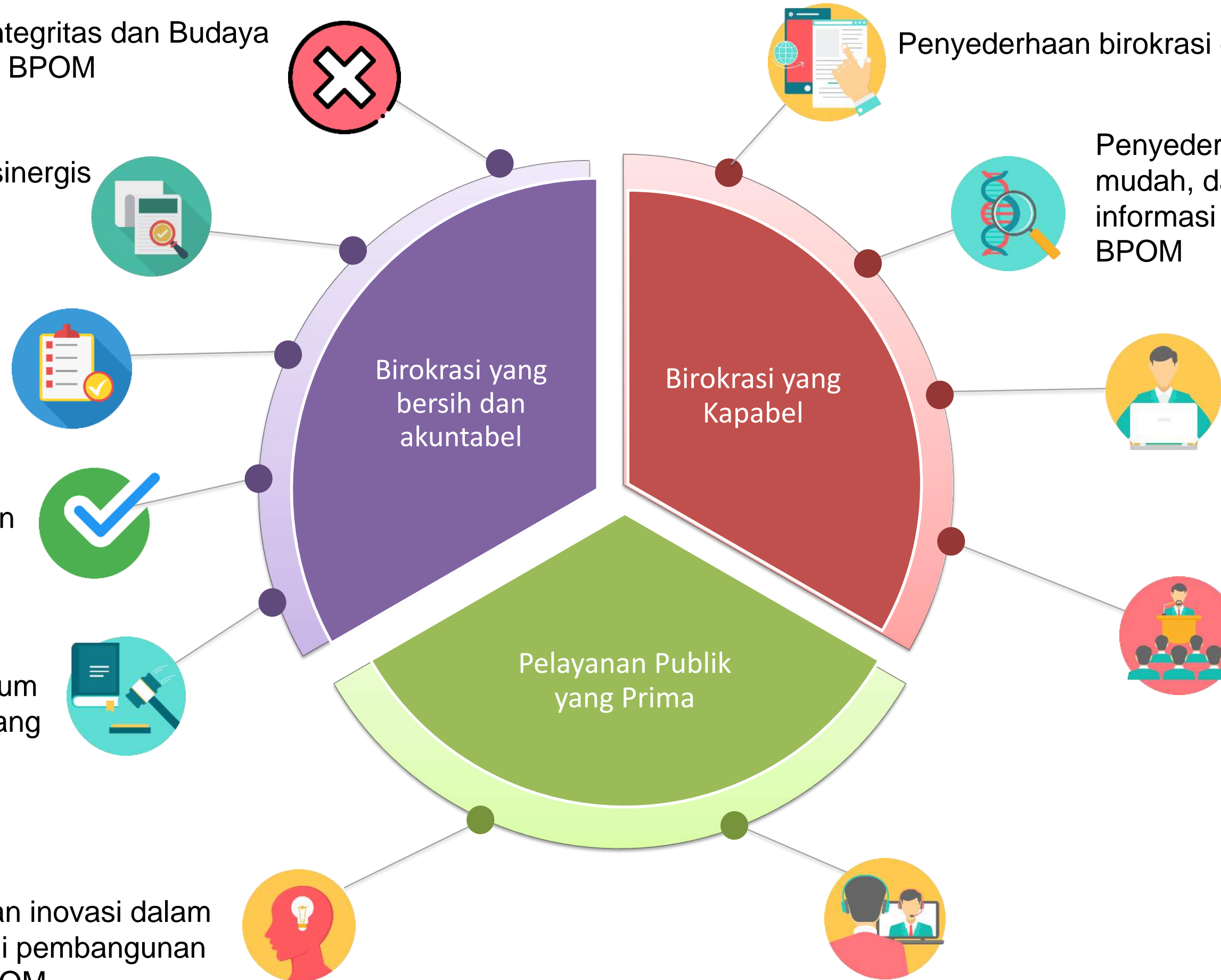
Meningkatnya *fairness*, transparansi, profesionalisme, dan nondiskriminatif dalam sistem manajemen organisasi di BPOM

Meningkatnya kepemimpinan transformatif di BPOM

Terwujudnya deregulasi hukum dan harmonisasi hukum bidang Obat dan Makanan

Meningkatnya penciptaan inovasi dalam pelayanan publik melalui pembangunan ekosistem Inovasi di BPOM

Menguatnya pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing



Indikator Kinerja Reformasi Birokrasi (Makro dan Meso)

Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024

INDIKATOR OUTCOME
INDEKS REFORMASI BIROKRASI

01

INDIKATOR IMPACT

1. *EASE DOING BUSINESS*
2. *CORRUPTION PERCEPTION INDEX*
3. *GOVERNMENT EFFECTIVENESS INDEX*
4. *TRUST BAROMETER*

02

03

BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL

BIROKRASI YANG KAPABEL

PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

| INDIKATOR | INDIKATOR | INDIKATOR |
|--|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2. INDEKS KAPABILITAS APIP 3. INDEKS MATURITAS SPIP 4. PREDIKAT SAKIP 5. OPINI BPK 6. INDEKS PERENCANAAN 7. INDEKS REFORMASI HUKUM 8. INDEKS TATA KELOLA PENGADAA BARANG DAN JASA | <ol style="list-style-type: none"> 1. INDEKS KELEMBAGAAN 2. INDEKS SPBE 3. INDEKS PROFESIONALISME ASN 4. INDEKS MERIT SYSTEM 5. INDEKS TATA KELOLA MANAJEMEN ASN 6. INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN 7. INDEKS PENGAWASAN KEARSIPAN 8. INDEKS KEPEMIMPINAN PERUBAHAN 9. INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN 10. INDEKS PENGELOLAAN ASET | <ol style="list-style-type: none"> 1. PUBLIC SERVICE INDEX (kualitas, akses, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Integritas) |

Progres Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM

1

Road Map RB BPOM harus segera disusun, **sinergis dan selaras** dengan Road Map RB Nasional (PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2020) dan Rencana Strategis BPOM 2020-2024

2

Perubahan mendasar dalam RB dalam evaluasi RB, yaitu fokus evaluasi terhadap **output, outcome**, dan **dampak** RB terhadap pelayanan publik dan masyarakat

3

Evaluasi RB berubah, dari yang hanya dievaluasi **output akhir** oleh KemenPANRB dan BPK, saat ini juga dilakukan evaluasi **output antara** oleh K/L lain melalui evaluasi berbagai indeks dan indikator RB

4

Mencantumkan Indeks dan indikator RB dalam Renstra BPOM. Beberapa Indeks belum ditetapkan DO dan mekanisme evaluasi oleh K/L **Leading Sector**

5

Merusmuskan RATL rekomendasi KemenPANRB atas hasil evaluasi RB tahun 2019

Poin Penting Reformasi Birokrasi BPOM



Kecepatan melayani dan memberi izin



Menghapus pola pikir linier, monoton, dan terjebak di zona nyaman



Adaptif, Produktif, Inovasi, Kompetitif

Zona Integritas



Peran Unit Kerja dalam percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) melalui Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Merupakan wujud komitmen Unit Kerja dalam membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta upaya peningkatan kualitas pelayanan publik



Percepatan Reformasi Birokrasi dengan membangun **Zona Integritas** di Unit Kerja Instansi Pemerintah

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan zona integritas di unit kerja instansi pemerintah dilakukan untuk mengakselerasi pencapaian sasaran reformasi birokrasi



Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik



PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



UNIT PERCONTOHAN

1. Dianggap sebagai unit yang penting/ strategis dalam melakukan pelayanan publik
2. Mengelola sumber daya yang cukup besar
3. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut

● **Miniaturnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia**

● **Bertujuan untuk membangun program RB sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas**

● **Membangun percontohan (*Role Model*) pada tingkat unit kerja pada Instansi Pemerintah sebagai unit menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani**



Ilustrasi RB & ZI WBK/WBBM



| REFORMASI BIROKRASI | ZONA INTEGRITAS (Menuju WBK/WBBM) |
|---|---|
| <p>Instansi Pemerintah (contoh Kementerian/Lembaga/Pe merintah Daerah)</p> | <p>Unit Kerja Pelayanan Instansi Pemerintah (contoh: RSUD, PTSP, Kantor Imigrasi, Polres, Samsat, dsb)</p> |
| <p>Unsur Pengungkit (8 Area)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Perubahan 2. Tatalaksana 3. Manajemen SDM 4. Akuntabilitas 5. Pengawasan 6. Pelayanan Publik 7. Organisasi 8. Peraturan Perundang-undangan | <p>Unsur Pengungkit (6 Area)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Perubahan 2. Tatalaksana 3. Manajemen SDM 4. Akuntabilitas 5. Pengawasan 6. Pelayanan Publik |
| <p>Hasil (3 sasaran)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (IPAK, IO) 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (IPP) 3. Kapasitas dan Akuntabilitas (AKIP,IJ) | <p>Hasil (2 sasaran)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (IPAK, TLHP) 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (IPP) |

5 LANGKAH STRATEGI MEMBANGUN ZI

MINDSET/CULTURE SET & KOMITMEN

Komitmen pimpinan dan semua karyawan dengan melibatkan bawahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama

KEMUDAHAN, KECEPATAN & TRANSPARANSI PELAYANAN

Menyediakan Fasilitas yang lebih baik dan sistem pelayanan yang cepat dan transparan serta semangat hospitallitty untuk kepuasan publik

PROGRAM YANG MENYENTUH MASYARAKAT

Membuat inovaasi program yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja tersebut

MONITORING DAN EVALUASI

Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya dan umpan balik perbaikan

MANAJEMEN MEDIA

Menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat

Hal yang perlu diperhatikan



TERDOKUMENTASI

Seluruh proses Pembangunan ZI harus didokumentasikan dengan baik sesuai dengan siklus rencanakan, laksanakan, monitoring dan evaluasi serta lakukan tindak lanjut perbaikan

DIBUKTIKAN STAKEHOLDER

Seluruh hasil pelaksanaan Pembangunan ZI harus dibuktikan oleh stakeholder melalui survei eksternal

Rekomendasi Kepada Unit Kerja yang Belum Berhasil WBK/WBBM (1)

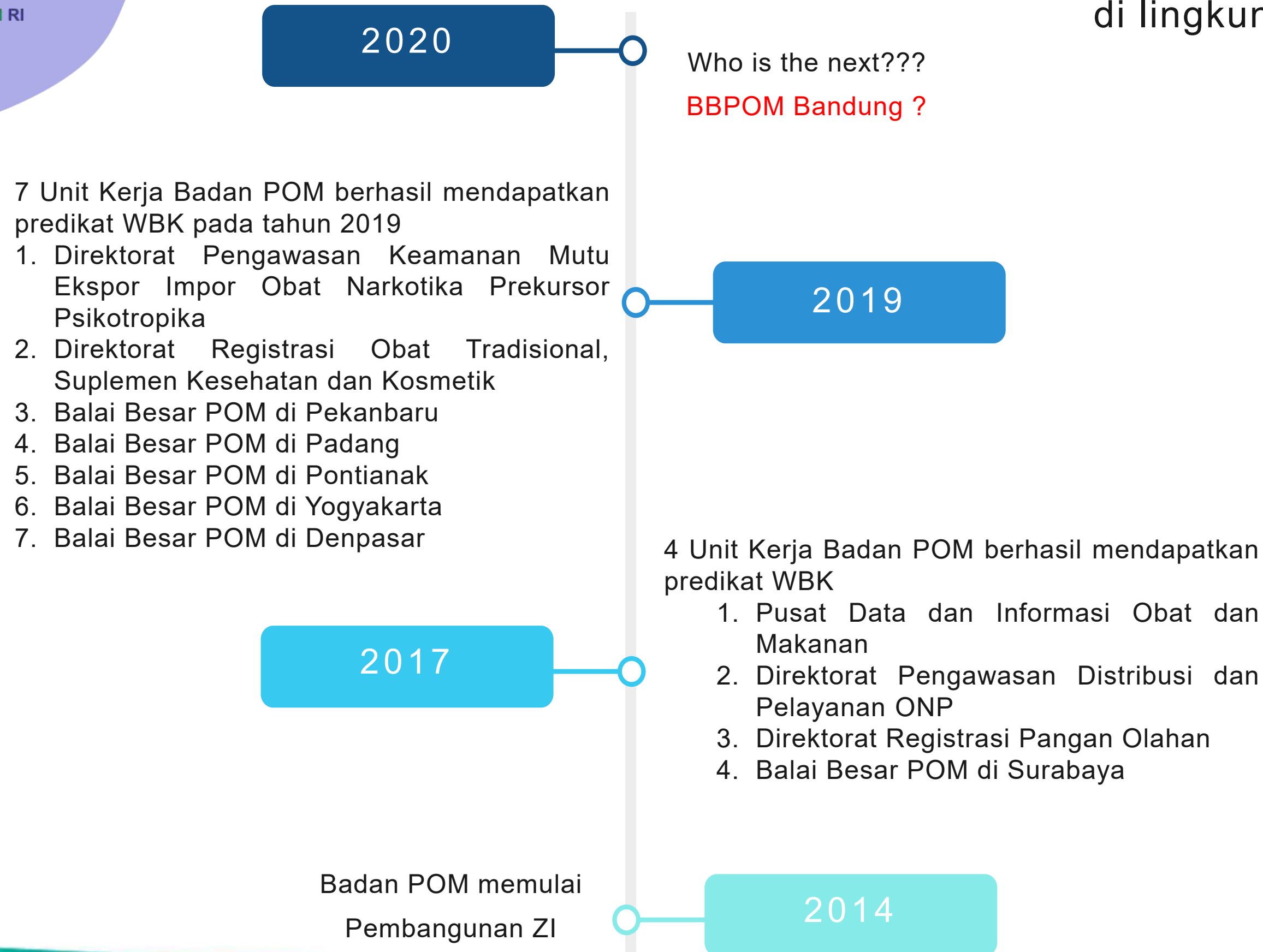
1. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pimpinan serta pegawai pada unit kerja terhadap substansi tiap-tiap area perubahan guna melakukan perubahan secara nyata di unit kerja, yaitu dengan adanya keterlibatan pimpinan secara aktif dalam melakukan monev pembangunan ZI, dialog antara pimpinan dengan seluruh pegawai secara berjenjang yang berfokus pada *sharing vision* guna mewujudkan perubahan pola pikir, integritas organisasi, dan budaya kinerja tinggi kepada seluruh tingkatan organisasi;
2. Meningkatkan keterlibatan pimpinan unit kerja dalam implementasi manajemen kinerja terkait dengan monev kinerja secara berjenjang dan berkala, sehingga terbangun budaya kinerja;
3. Menyusun peta risiko di setiap unit kerja dengan memperhatikan potensi terjadinya penyimpangan integritas yang dilakukan oleh pegawai serta meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam melakukan monev terhadap pelaksanaan sistem pengawasan secara rutin dan berkelanjutan;

Rekomendasi Kepada Unit Kerja yang Belum Berhasil WBK/WBBM (2)

4. Memperbaiki strategi komunikasi dari setiap unit kerja untuk meningkatkan kedekatan mereka dengan masyarakat atau pemangku kepentingan dengan cara mengefektifkan pengelolaan media dalam menginformasikan perubahan/inovasi yang dilakukan oleh unit kerja. Hal tersebut diharapkan dapat menjelaskan kepada masyarakat atas berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh unit kerja dalam meningkatkan kualitas layanan maupun meningkatkan integritas organisasi;
5. Melakukan program inovasi pelayanan yang sifatnya mendekatkan, mempermudah dan mempercepat waktu layanan, serta *hospitality* petugas kepada masyarakat sesuai dengan *core business* unit kerja;
6. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala atas kualitas dan integritas pelayanan kepada penerima layanan dengan menggunakan *tools* yang selaras dengan survei eksternal sehingga dapat mengurangi gap nilai survei, serta menindaklanjuti hasil survei tersebut untuk umpan balik perbaikan kualitas dan integritas pelayanan secara berkelanjutan;
7. Meningkatkan kapasitas Tim Penilai Internal (TPI) terkait dengan substansi Reformasi Birokrasi dan ZI WBK/WBBM serta teknik evaluasinya.

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN ZI

di lingkungan Badan POM



Terima Kasih



Satu Tindakan Untuk Masa Depan, Baca Label Sebelum Membeli

@ halobpom@pom.go.id  www.pom.go.id  @bpom_ri  Bpom RI

 @bpom_ri  BADAN POM RI

Layanan Pelaporan *Whistle Blowing System*, Benturan Kepentingan dan Gratifikasi :

rb.pom.go.id atau ppid.pom.go.id atau pengaduanyanblik@pom.go.id

+62 21 424 4691 atau +62 21 428 83309 atau +62 21 428 83462

+62 812 1999 9533